

BANK BUDI: INSTITUSI EKONOMI INFORMAL DAN MODAL SOSIAL DALAM SISTEM EKONOMI TRADISIONAL NIAS SELATAN PRA-KOLONIAL

Oleh :

Juang Solala Laiya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nias Raya
email: juang@uniraya.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 31 Agustus 2026

Revisi, 28 September 2026

Diterima, 29 September 2026

Publish, 30 September 2026

Kata Kunci :

Ekonomi Kelembagaan,
Institusi Ekonomi Informal,
Modal Sosial,
Ekonomi Tradisional Nias Selatan,
Resiprositas.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji struktur kelembagaan adat yang membentuk sistem ekonomi tradisional masyarakat Nias Selatan pra-kolonial melalui studi pustaka, dengan memosisikannya dalam kerangka teori ekonomi kelembagaan. Selama ini, kajian ekonomi kelembagaan di Indonesia cenderung berfokus pada institusi ekonomi formal-modern, sementara sistem ekonomi informal pra-kolonial Nusantara—yang berpotensi menjadi preseden historis bagi institusi ekonomi informal kontemporer seperti arisan dan kelompok simpan-pinjam berbasis kekerabatan—masih jarang dianalisis secara sistematis melalui lensa ekonomi kelembagaan. Dengan menelaah sumber etnografis-historis (Rappard, 1909; Schröder, 1917; Loeb, 1935) serta studi antropologis modern (Beatty, 1991, 1992; Viaro & Ziegler, 2017; Yamamoto, 1986), penelitian ini menemukan bahwa integrasi ekonomi masyarakat Nias Selatan pra-kolonial didominasi oleh mekanisme non-pasar yang terstruktur, meliputi beras, babi, dan emas sebagai objek nilai penting yang dalam penelitian ini dianalisis sebagai *commodity money*; institusi sosial (*gagambatö, gana, nafulu, banua, dan öri*) yang sekaligus menjalankan fungsi produksi dan distribusi; konsep utang (*ömö/gömö*) sebagai instrumen kredit informal yang tertanam dalam modal sosial; serta pesta status (*ovasa*) sebagai arena mobilisasi sumber daya, redistribusi surplus, dan berbagi risiko. Hubungan antara kewajiban resiprokal, utang sosial, jaringan kekerabatan, mobilisasi sumber daya, dan redistribusi tersebut dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai “Bank Budi”. Istilah ini merupakan konsep analitis penulis, bukan kategori emik masyarakat Nias Selatan. Temuan penelitian memperkaya pemahaman mengenai pola integrasi ekonomi sebagaimana dirumuskan Polanyi (1957), sekaligus menawarkan preseden historis bagi kajian ekonomi informal dan keuangan inklusif berbasis kelembagaan lokal di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Juang Solala Laiya
Afiliasi: Universitas Nias Raya
Email: juang@uniraya.ac.id

1. PENDAHULUAN

Institusi ekonomi informal—jaringan kekerabatan, kelompok simpan-pinjam berbasis komunitas, dan norma resiprositas yang tidak tercatat dalam hukum formal—telah lama diakui memainkan peran penting dalam perekonomian negara

berkembang, termasuk Indonesia. Namun, kajian ekonomi kelembagaan di Indonesia cenderung memusatkan perhatian pada institusi formal-modern atau, ketika membahas institusi informal, pada praktik kontemporer seperti arisan dan koperasi tanpa banyak menelusuri akar historisnya. Padahal,

berbagai catatan etnografis menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara sebelum terbentuknya institusi ekonomi formal modern telah mengoperasikan mekanisme produksi, pertukaran, kredit, dan redistribusi yang tertanam dalam hubungan sosial. Kesenjangan tersebut terlihat dalam kasus Nias Selatan, yang memiliki dokumentasi etnografis cukup kaya dalam karya-karya mengenai masyarakat Nias sejak awal abad ke-20 (Rappard, 1909; Schröder, 1917; Loeb, 1935), tetapi relatif jarang dibaca secara sistematis melalui perspektif ekonomi kelembagaan.

Dalam penelitian ini, istilah pra-kolonial digunakan secara operasional untuk merujuk pada periode sebelum 1907. Batas tersebut menandai fase ketika penetrasi kolonial Belanda di Nias Selatan memasuki tahap yang lebih intensif setelah operasi militer 1900–1901 dilanjutkan dengan penempatan controleur Letnan Eman pada 1902–1904 untuk meneruskan proses pasifikasi wilayah tersebut (Telaumbanua & Hümmel, 2015, hlm. 404). Tahun 1907 karena itu digunakan sebagai batas analitis penelitian ini. Pada tahun tersebut, Belanda akhirnya menaklukkan bagian paling selatan Pulau Nias (Marschall, 2002, hlm. 313), yang menandai tercakupnya seluruh pulau dalam kontrol kolonial Belanda. Masyarakat Nias, termasuk masyarakat di bagian selatan pulau, telah melakukan kontak dengan berbagai bangsa dan kelompok luar jauh sebelum periode tersebut, tetapi kontak itu dinilai hanya memberikan pengaruh terbatas terhadap adat-istiadat dan agama asli mereka (Telaumbanua & Hümmel, 2015, hlm. 71). Sejumlah sumber yang diterbitkan setelah 1907 tetap digunakan apabila mendokumentasikan praktik dan institusi Nias Selatan yang telah terbentuk dan berlangsung pada periode sebelumnya. Dengan demikian, tahun penerbitan sumber dibedakan dari periode historis fenomena yang direkonstruksi.

Secara geografis, unit analisis penelitian ini adalah Nias Selatan. Dalam penelitian ini, Nias Selatan dipahami sebagai kawasan geografis-kultural historis di bagian selatan Pulau Nias yang memiliki konfigurasi linguistik, sosial, politik, adat, dan kelembagaan yang khas, tetapi tidak diperlakukan sebagai kawasan budaya dengan batas yang sepenuhnya tegas. Literatur membedakan Pulau Nias ke dalam tiga kawasan budaya utama—Nias Utara, Nias Tengah, dan Nias Selatan—namun juga menunjukkan adanya praktik kultural yang digunakan bersama serta kedekatan tertentu antara kawasan-kawasan tersebut, khususnya antara Nias Tengah dan Nias Selatan (Brown, 2001; Telaumbanua & Hümmel, 2015, hlm. 18–19; Zagötö, 2018). Karena itu, pengertian Nias Selatan dalam penelitian ini tidak disamakan dengan batas administratif Kabupaten Nias Selatan kontemporer, yang juga mencakup wilayah dengan kedekatan kultural terhadap Nias Tengah. Sejumlah sumber yang digunakan memiliki cakupan pembahasan Pulau Nias secara lebih luas, tetapi pemilihannya

didasarkan pada bagian-bagian yang secara khusus mendokumentasikan masyarakat, praktik, dan institusi yang relevan dengan konfigurasi Nias Selatan. Informasi yang merujuk pada Nias secara umum hanya digunakan apabila konteks sumber mendukung relevansinya bagi kawasan penelitian. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan konteks tanpa mengasumsikan bahwa batas-batas budaya di Pulau Nias bersifat kaku atau sepenuhnya berimpit dengan batas administratif kontemporer.

Persoalan tersebut memiliki relevansi yang tidak hanya historis. Dalam periode yang dicakup Peraturan Presiden No. 131/2015 dan No. 63/2020, sejumlah wilayah di Kepulauan Nias, termasuk wilayah Nias Selatan, masuk dalam kategori daerah tertinggal, sementara data Badan Pusat Statistik Sumatra Utara tahun 2025 yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Sejumlah kajian mengenai kemiskinan di Nias dan Nias Selatan—termasuk Rivai (1989), Gulo, Ginting, dan Suriadi (2005), Waruwu (2007), serta Gowasa dan Ritonga (2015)—lebih banyak menekankan variabel ekonomi konvensional seperti pendapatan, akses pasar, dan infrastruktur. Pendekatan tersebut sah dan penting, tetapi dapat dilengkapi dengan perhatian terhadap struktur kelembagaan informal yang secara historis mengatur produksi, pertukaran, kewajiban, dan mobilisasi sumber daya masyarakat Nias Selatan.

Dari perspektif teoretis, keterbatasan kajian yang memosisikan data etnografis Nias Selatan dalam kerangka ekonomi kelembagaan juga menyisakan ruang dalam literatur yang lebih luas. Konsep mengenai pola integrasi ekonomi (Polanyi, 1957), institusi formal dan informal (North, 1990), modal sosial (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Putnam, 1993, 2000), dan ekonomi hadiah (Mauss, 1925) telah banyak digunakan untuk membaca masyarakat non-Barat di berbagai wilayah. Kasus-kasus Nusantara, termasuk Nias Selatan, relatif kurang hadir sebagai sumber empiris dalam diskusi ekonomi kelembagaan, meskipun dokumentasi etnografis mengenai wilayah tersebut cukup kaya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana struktur kelembagaan sistem ekonomi tradisional masyarakat Nias Selatan pra-kolonial, khususnya dalam mekanisme produksi, objek nilai dan pertukaran, institusi sosial, utang, dan redistribusi sumber daya? Kedua, bagaimana struktur kelembagaan tersebut dapat dipahami melalui kerangka ekonomi kelembagaan, dan sejauh mana rekonstruksi historis Nias Selatan pra-kolonial tersebut relevan bagi diskusi mengenai ekonomi informal dan keuangan inklusif kontemporer?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan merekonstruksi struktur kelembagaan ekonomi tradisional Nias Selatan pra-kolonial melalui sumber etnografis-historis dan antropologis; menganalisis struktur tersebut melalui kerangka ekonomi substantif, Ekonomi Kelembagaan Baru, modal sosial, dan ekonomi hadiah; serta mendiskusikan kontribusi teoretis dan kemungkinan relevansinya bagi kajian ekonomi informal.

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis Ekonomi Substantif: Resiprositas, Redistribusi, dan Pertukaran

Kerangka teoretis utama penelitian ini bersumber dari pendekatan ekonomi substantif Karl Polanyi (1957). Polanyi berargumen bahwa aktivitas ekonomi tidak selalu terintegrasi terutama melalui mekanisme pasar sebagaimana diasumsikan ekonomi formal modern. Ia membedakan tiga pola integrasi: resiprositas, yaitu pertukaran timbal balik antarpihak yang ditempatkan dalam hubungan sosial tertentu; redistribusi, yaitu pengumpulan sumber daya pada suatu pusat sebelum dialokasikan kembali; serta pertukaran pasar yang dimediasi oleh mekanisme harga.

Ketiga pola tersebut merupakan kategori analitis dan tidak harus saling meniadakan. Dalam masyarakat konkret, lebih dari satu mekanisme dapat bekerja secara bersamaan. Kerangka ini relevan bagi kasus Nias Selatan karena mekanisme pertukaran tenaga kerja, kewajiban antarkerabat, mobilisasi sumber daya untuk pesta status (*ovasa*), dan distribusi kembali hasil pesta menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tertanam dalam institusi sosial yang tidak dapat direduksi pada transaksi pasar.

Ekonomi Kelembagaan Baru: Institusi Formal dan Informal

Kerangka kedua bersumber dari Ekonomi Kelembagaan Baru sebagaimana dirumuskan Douglass North (1990), yang mendefinisikan institusi sebagai “aturan main” dalam masyarakat, yakni batasan yang membentuk interaksi manusia. North membedakan institusi formal seperti hukum dan hak kepemilikan yang dikodifikasi dari institusi informal seperti konvensi, norma perilaku, dan kode etik yang mengikat secara sosial.

Kerangka ini memungkinkan unit sosial Nias Selatan—*gagambatö*, *gana*, *nafulu*, *banua*, dan *öri*—dibaca tidak hanya sebagai kategori kekerabatan atau politik, tetapi sebagai institusi yang turut mengatur penggunaan sumber daya, kewajiban sosial, kerja kolektif, standardisasi nilai, dan penyelesaian pelanggaran. Analisis tidak menganggap institusi tersebut identik dengan institusi modern, melainkan memeriksa fungsi-fungsi ekonomi yang dijalankannya dalam konfigurasi sosial yang berbeda.

Modal Sosial sebagai Aset Ekonomi

Kerangka ketiga adalah teori modal sosial. Bourdieu (1986) mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya yang terkait dengan

kepemilikan jaringan hubungan yang relatif langgeng dan dapat dikonversi menjadi bentuk modal lain. Coleman (1988) menekankan kemampuan struktur relasi sosial untuk memfasilitasi tindakan, sedangkan Putnam (1993, 2000) menyoroti jaringan, norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi serta kerja sama kolektif.

Ketiga perspektif tersebut digunakan untuk membaca bagaimana hubungan kekerabatan dan partisipasi jangka panjang dalam pertukaran sosial memungkinkan seseorang memobilisasi tenaga, barang, pinjaman, bantuan, atau sumbangan ketika membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Dalam pengertian ini, reputasi dan jaringan sosial bukan sekadar atribut simbolik, tetapi dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang nyata.

Ekonomi Hadiah: Kewajiban Memberi, Menerima, dan Membalas

Kerangka keempat bersumber dari studi Marcel Mauss (1925) mengenai ekonomi hadiah. Mauss menunjukkan bahwa pemberian dalam banyak masyarakat tidak sepenuhnya bersifat cuma-cuma, melainkan membangun kewajiban untuk memberi, menerima, dan membalas. Kewajiban tersebut mempertautkan transaksi material dengan hubungan sosial dan moral.

Kerangka ini relevan dengan konsep *ömö/gömö* serta kewajiban timbal balik dalam masyarakat Nias Selatan, di mana utang tidak selalu terbatas pada kewajiban finansial. Kegagalan membalas bantuan atau kewajiban dapat memiliki konsekuensi reputasional, adat, bahkan spiritual. Dengan demikian, hubungan ekonomi tidak berdiri terpisah dari tatanan moral yang menopangnya.

Kebaruan Penelitian

Keempat kerangka teoretis di atas—substantivisme Polanyi, Ekonomi Kelembagaan Baru North, modal sosial Bourdieu-Coleman-Putnam, dan ekonomi hadiah Mauss—telah banyak diterapkan pada studi kasus masyarakat non-Barat di berbagai belahan dunia, namun jarang digunakan secara terintegrasi untuk membaca data etnografis masyarakat Nusantara, khususnya Nias Selatan. Sebagian besar literatur yang memuat data mengenai Nias Selatan (Rappard, 1909; Schröder, 1917; Beatty, 1991, 1992; Viaro & Ziegler, 2017) ditulis dari perspektif antropologi budaya, tanpa secara eksplisit memosisikan temuan-temuannya dalam kerangka ekonomi kelembagaan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menerapkan keempat kerangka teoretis di atas secara terintegrasi terhadap data etnografis-historis Nias Selatan pra-kolonial, sekaligus menawarkan preseden historis yang dapat memperkaya diskusi kontemporer tentang institusi ekonomi informal dan keuangan inklusif berbasis kearifan lokal di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada penggunaan kerangka tersebut terhadap kasus Nias Selatan, tetapi pada rekonstruksi hubungan antar-institusi yang dalam literatur lebih sering

dideskripsikan secara terpisah. Penelitian ini menunjukkan bahwa produksi, pertukaran, kekerabatan, utang, mobilisasi sumber daya, pesta status, dan redistribusi membentuk suatu arsitektur kelembagaan yang saling terhubung. Dalam konfigurasi tersebut, institusi sosial menjalankan fungsi alokasi sumber daya dan penegakan kewajiban; resiprositas dan redistribusi dapat beroperasi dalam institusi yang sama; sementara modal sosial dapat dikonversi menjadi kapasitas ekonomi sekaligus menghasilkan kewajiban dan eksklusivitas. Atas dasar pembacaan terintegrasi tersebut, penelitian ini menggunakan istilah analitis **“Bank Budi”** untuk merujuk pada konfigurasi kelembagaan yang menghubungkan utang sosial, kewajiban resiprositas, jaringan kekerabatan, mobilisasi sumber daya, dan redistribusi. Istilah ini merupakan konsep analitis penulis, bukan kategori emik masyarakat Nias Selatan dan tidak digunakan secara eksplisit dalam sumber-sumber etnografis yang dianalisis.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka kualitatif-interpretatif dengan pendekatan analisis kelembagaan historis. Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian berupa struktur kelembagaan ekonomi pada periode yang tidak lagi dapat diamati secara langsung sehingga harus direkonstruksi melalui sumber historis-etnografis dan penelitian antropologis kemudian.

Analisis tidak memperlakukan kategori ekonomi kelembagaan kontemporer sebagai istilah yang digunakan masyarakat Nias Selatan pada masa lalu. Konsep seperti resiprositas, redistribusi, institusi informal, modal sosial, *commodity money*, dan mekanisme berbagi risiko digunakan sebagai perangkat analitis untuk membaca pola yang terdokumentasi dalam sumber. Penelitian karena itu membedakan antara deskripsi empiris yang diberikan sumber dan interpretasi teoretis yang diajukan penulis.

Pemilihan dan Klasifikasi Sumber

Sumber dipilih secara purposif berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, sumber memuat informasi mengenai praktik produksi, pertukaran, objek nilai, kekerabatan, utang, pesta status, stratifikasi, atau distribusi sumber daya yang relevan dengan masyarakat Nias Selatan. Kedua, informasi memiliki relevansi geografis dengan Nias Selatan, baik karena sumber secara khusus membahas wilayah tersebut maupun karena bagian yang digunakan secara eksplisit merujuk pada praktik masyarakat di bagian selatan Pulau Nias. Ketiga, informasi tersebut relevan bagi rekonstruksi struktur kelembagaan yang telah terbentuk pada periode pra-kolonial, termasuk apabila praktik tersebut baru didokumentasikan dalam sumber yang diterbitkan pada awal periode kolonial. Keempat, apabila memungkinkan,

informasi diperiksa silang dengan sumber lain yang berbeda periode atau latar belakang penulisnya.

Berdasarkan fungsi analitisnya, sumber dibedakan menjadi empat kelompok. Pertama, sumber historis-etnografis seperti Hull (1829), Rappard (1909), Schröder (1917), dan Loeb (1935), yang terutama digunakan untuk merekonstruksi praktik, struktur sosial, ukuran, objek nilai, serta bentuk pertukaran. Kedua, studi antropologis modern seperti Yamamoto (1986), Scarduelli (1990), Beatty (1991, 1992), serta Viaro dan Ziegler (2017), yang digunakan untuk memperjelas konteks sosial dan logika hubungan antar-institusi. Ketiga, karya peneliti dan budayawan Nias seperti Laiya (1983) serta Telaumbanua dan Hümmel (2015), yang membantu memperjelas terminologi dan perspektif lokal. Keempat, literatur Polanyi, North, Bourdieu, Coleman, Putnam, dan Mauss digunakan sebagai perangkat analisis dan bukan sebagai bukti historis mengenai masyarakat Nias Selatan.

Prosedur Analisis

Analisis dilakukan melalui tiga tahap yang berurutan. Tahap pertama adalah rekonstruksi empiris melalui ekstraksi tematik. Sumber dibaca untuk mengidentifikasi informasi mengenai lima domain utama: produksi dan penggunaan sumber daya; objek nilai dan pertukaran; organisasi sosial yang menjalankan fungsi ekonomi; utang dan kewajiban resiprositas; serta pesta status dan mekanisme distribusi.

Tahap kedua adalah perbandingan antarsumber. Deskripsi mengenai praktik atau institusi yang sama diperbandingkan untuk mengidentifikasi konsistensi, variasi, dan perbedaan. Temuan yang memperoleh dukungan dari beberapa sumber yang berbeda diperlakukan sebagai dasar interpretasi yang lebih kuat. Informasi yang hanya terdapat dalam satu sumber tidak otomatis dikeluarkan, tetapi tingkat kepastian interpretasinya dibatasi dan dikontekstualisasikan dengan informasi lain yang tersedia.

Tahap ketiga adalah pemetaan konseptual. Setelah pola empiris direkonstruksi, temuan tersebut dibaca menggunakan kategori ekonomi kelembagaan yang relevan. Penggunaan beras, babi, dan emas sebagai objek nilai dan media pertukaran, misalnya, dianalisis melalui konsep *commodity money*; unit sosial seperti *gagambatō*, *gana*, dan *ōri* dibaca sebagai institusi informal; sedangkan mobilisasi dan pembagian sumber daya melalui *ovasa* dianalisis melalui konsep resiprositas dan redistribusi. Urutan tersebut dimaksudkan untuk menghindari penetapan kategori teoretis sebelum pola empiris dalam sumber terlebih dahulu diidentifikasi.

Keabsahan Interpretasi

Keabsahan interpretasi dijaga melalui triangulasi dan kritik sumber. Deskripsi atas praktik yang sama dibandingkan menggunakan sumber yang berbeda periode, latar belakang, dan posisi pengamat. Kesamaan deskripsi antarsumber meningkatkan

tingkat keyakinan terhadap suatu rekonstruksi, tetapi tidak dianggap menghapus kemungkinan variasi lokal maupun perubahan historis.

Jika terdapat perbedaan antarsumber, penelitian tidak mengharmonisasikannya secara otomatis. Perbedaan dinilai berdasarkan kedekatan sumber dengan praktik yang dideskripsikan, tingkat kedetailan informasi, posisi pengamat, konteks geografis, dan dukungan dari sumber lain yang tersedia. Apabila bukti belum cukup untuk menetapkan suatu interpretasi secara kuat, kesimpulan disajikan sebagai pembacaan analitis yang tentatif.

Keterbatasan Metodologis

Sebagian sumber historis yang digunakan ditulis oleh administrator kolonial atau pengamat luar sehingga tidak sepenuhnya bebas dari kategori, kepentingan, dan keterbatasan posisi penulisnya. Triangulasi dengan penelitian antropologis kemudian dan sumber lokal digunakan untuk mengurangi, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghilangkan, persoalan tersebut.

Keterbatasan kedua berasal dari penggunaan kategori analitis kontemporer untuk membaca fenomena historis. Konsep seperti *commodity money*, modal sosial, resiprositas, redistribusi, dan mekanisme berbagi risiko bukan kategori emik masyarakat Nias Selatan pra-kolonial. Konsep-konsep tersebut digunakan sebagai perangkat analitis untuk membaca pola yang terdokumentasi dalam sumber, dan karena itu tidak boleh disamakan dengan cara masyarakat pada masa tersebut memahami praktik mereka sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Produksi dan Alokasi Faktor Sumber Daya

Struktur produksi masyarakat Nias Selatan pra-kolonial menunjukkan pola alokasi sumber daya yang tidak terutama diintegrasikan melalui mekanisme pasar. Tanah sebagai faktor produksi utama tidak diperlakukan sebagai komoditas privat individual, melainkan berada dalam pengawasan desa dan otoritas *si'ulu* sebagai keturunan pendiri desa (Rappard, 1909, hlm. 597; Lansing & deVet, 1999, hlm. 87). Setiap warga yang hendak membuka lahan baru harus memperoleh izin dari *si'ulu* (Scarduelli, 1990, hlm. 453). Dalam terminologi ekonomi kelembagaan, pola ini dapat dibaca sebagai rezim hak pemanfaatan sumber daya yang dikelola secara komunal, di mana akses terhadap lahan diatur melalui institusi sosial dan politik setempat, bukan semata-mata melalui kepemilikan privat dan transaksi pasar.

Produksi pertanian juga memperlihatkan keterkaitan antara budi daya tanaman dan peternakan. Dalam sistem *aro göli*, lahan yang dibuka dibagi untuk tanaman pangan dan pemeliharaan babi, sehingga hasil pertanian menyediakan pangan bagi manusia dan ternak, sementara kotoran ternak ikut menopang kesuburan lahan (Telaumbanua &

Hümmel, 2015, hlm. 52). Setelah beberapa kali digunakan, lahan dibiarkan kembali menjadi hutan sebelum kelak dapat digarap kembali (Rappard, 1909, hlm. 553). Secara analitis, pola ini dapat dibaca sebagai bentuk diversifikasi produksi dalam kondisi teknologi dan modal yang terbatas, tanpa harus menganggap bahwa masyarakat pada masa itu memahami praktik tersebut melalui kategori “mitigasi risiko” sebagaimana digunakan dalam ekonomi modern.

Tenaga kerja dialokasikan terutama melalui jaringan rumah tangga dan hubungan sosial. *Sangambatö/gagambatö sebua* tidak hanya merupakan unit kekerabatan, tetapi juga unit ekonomi yang hidup bersama dan mengelola sumber pangan serta kegiatan produksi secara kolektif (Danandjaja, 1976, hlm. 99; Yamamoto, 1986, hlm. 82; Telaumbanua & Hümmel, 2015, hlm. 57). Viaro dan Ziegler (2017, hlm. 14) menggambarkan rumah tangga domestik tersebut sebagai unit produksi-konsumsi dengan satu tungku bersama dan pengelolaan persediaan pangan yang terpusat. Selain itu, masyarakat mengenal pertukaran tenaga kerja resiprokal yang disebut *falulu* atau *fasulö luo*: suatu keluarga membantu keluarga lain bekerja selama beberapa hari dan menerima bantuan sebanding pada kesempatan berikutnya (Beatty, 1992, hlm. 192). Mekanisme ini lebih tepat dipahami sebagai mobilisasi tenaga kerja melalui resiprositas daripada sebagai “pasar tenaga kerja informal”, karena pertukaran tersebut tertanam dalam hubungan sosial dan tidak dimediasi terutama oleh upah atau harga.

Objek Nilai Tradisional sebagai *Commodity Money*

Beras, babi, dan emas merupakan objek nilai penting dalam sistem pertukaran masyarakat Nias Selatan. Beatty (1992, hlm. 190–198) membahas ketiganya secara sistematis sebagai sumber daya yang digunakan untuk menyatakan dan memindahkan nilai dalam berbagai transaksi sosial, sementara Schröder (1917, hlm. 202) secara eksplisit mencatat beras, babi, dan emas sebagai bentuk “uang”, meskipun ia juga menyebut gong sebagai objek yang dapat menjalankan fungsi serupa. Karena itu, ketiganya tidak diperlakukan sebagai daftar eksklusif seluruh media nilai di Nias Selatan, tetapi sebagai objek yang paling sistematis terdokumentasi dan diperbandingkan dalam sumber-sumber yang dianalisis.

Istilah *commodity money* digunakan di sini sebagai kategori analitis, bukan sebagai konsep emik masyarakat Nias Selatan. Beras, babi, dan emas tidak disebut “komoditas” oleh masyarakat pra-kolonial dalam pengertian ekonomi modern, tetapi ketiganya berfungsi sebagai media pertukaran yang nilainya dapat diukur, dibandingkan, dan digunakan untuk memenuhi berbagai kewajiban sosial. Nilainya juga tidak semata-mata ditentukan secara individual dalam transaksi, melainkan memperoleh legitimasi kelembagaan melalui *fondrakö*. Dalam perayaan

penetapan hukum adat tersebut, antara lain ditetapkan takaran beras, standar berat babi, komposisi emas, serta instrumen pengukurannya; setiap *öri* memiliki sistem bobot dan kesetaraan yang menjadi norma pertukaran (Viaro & Ziegler, 2017, hlm. 24–25). Dengan demikian, fungsi pertukaran ketiga objek tersebut bertumpu pada kombinasi antara nilai material dan standardisasi sosial yang diakui bersama.

Beras (*fakhe*) relatif mudah dibagi dan diukur melalui satuan seperti *tumba*, *nali*, dan kemudian *teko* (Beatty, 1992, hlm. 190–191). Babi (*bawi*), yang banyak digunakan dalam mahar, pesta, dan pembayaran adat, dinilai antara lain melalui pengukuran lingkaran tubuh dengan *afore* dalam satuan *alisi* (Beatty, 1992, hlm. 194). Emas (*ana'a*) memiliki daya simpan yang lebih tinggi dan digunakan dalam transaksi bernilai besar; nilainya ditentukan melalui timbangan *faliera*, batu uji *maera*, dan klasifikasi berdasarkan komposisi emas (Rappard, 1909, hlm. 557). Selain fungsi pertukarannya, ketiga objek tersebut tetap memiliki nilai guna, sosial, ritual, dan simbolik.

Perbedaan karakter tersebut menunjukkan bahwa beras, babi, dan emas tidak menjalankan fungsi moneter dalam kadar yang sama. Namun ketiganya dapat ditempatkan dalam suatu sistem kesetaraan yang memungkinkan objek dengan karakter material berbeda digunakan sebagai media nilai. Dalam pengertian inilah ketiganya dianalisis sebagai *commodity money*: bukan karena masyarakat Nias Selatan memiliki konsepsi modern mengenai komoditas atau uang, tetapi karena objek-objek tersebut menjalankan fungsi pertukaran berdasarkan standar nilai yang dilembagakan secara sosial.

Masuknya koin asing tidak serta-merta menggantikan logika tersebut. Schröder (1917, hlm. 202) mencatat bahwa koin dapat dinilai berdasarkan kandungan logamnya dan bahkan dipotong sesuai kebutuhan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap instrumen moneter dari luar masih berlangsung melalui logika nilai material yang telah dikenal masyarakat.

Kasus ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengaturan nilai ekonomi dalam masyarakat Nias Selatan pra-kolonial tidak terpisah dari institusi sosial yang lebih luas. Melalui *fondrakö*, standardisasi beras, babi, dan emas menjadi bagian dari tatanan hukum dan adat yang juga mengatur kewajiban sosial, status, wilayah, dan sanksi. Dengan demikian, pertukaran ekonomi bekerja sebagai praktik yang tertanam dalam struktur sosial dan kelembagaan masyarakat.

Institusi Sosial sebagai Unit Ekonomi Fungsional

Merujuk pada konsep institusi informal North (1990), unit-unit sosial masyarakat Nias Selatan dapat dibaca bukan hanya sebagai kategori kekerabatan dan politik, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan fungsi ekonomi. Pada tingkat rumah tangga, *sangambatö/gagambatö sebua*

menjadi unit produksi-konsumsi dasar (Danandjaja, 1976, hlm. 99; Yamamoto, 1986, hlm. 82; Viaro & Ziegler, 2017, hlm. 14). Pada tingkat kekerabatan yang lebih luas, *gana* merupakan kelompok berbasis garis keturunan patrilineal (Yamamoto, 1986, hlm. 93) yang menjalankan fungsi tolong-menolong sosial dan ekonomi (Danandjaja, 1976, hlm. 99). Dalam konteks pesta dan perkawinan, *gana* juga menjadi jaringan tempat seseorang dapat memperoleh sebagian sumber daya untuk memenuhi biaya mahar dan kewajiban pertukaran (Viaro & Ziegler, 2017, hlm. 14).

Pada tingkat komunitas, *nafulu* merupakan unit fungsional yang umumnya terdiri atas sepuluh orang dan dimobilisasi secara bergiliran untuk pekerjaan kolektif desa, termasuk pemeliharaan akses desa, fasilitas umum, dan tugas-tugas komunal lainnya (Viaro & Ziegler, 2017, hlm. 14). Dengan demikian, penyediaan sejumlah kebutuhan kolektif tidak bergantung pada organisasi birokrasi tersendiri, tetapi dilekatkan pada kewajiban keanggotaan warga dalam unit sosial.

Pada tingkat politik-teritorial, keluarga dan *gana* terhimpun ke dalam *banua* atau desa (Schröder, 1917, hlm. 261). Masing-masing *banua* pada dasarnya memiliki otonomi yang kuat (Viaro & Ziegler, 2017, hlm. 83), sementara di Nias Selatan beberapa *banua* dapat membentuk aliansi yang disebut *öri* (Telaumbanua & Hümmel, 2015, hlm. 58). *Öri* menjalankan fungsi yang melampaui pertahanan: Schröder (1917, hlm. 78) mencatat perannya dalam mempermudah perkawinan eksogami, perlindungan, dan saling membantu dalam menghadapi serangan.

Dalam perayaan *fondrakö*, kelompok-kelompok yang tergabung dalam suatu *öri* juga menetapkan berbagai aturan bersama, termasuk batas wilayah, ukuran beras, standar berat babi, komposisi emas, mahar, kerja komunal, serta denda atas pelanggaran (Viaro & Ziegler, 2017, hlm. 24–25). Karena itu, *gagambatö*, *gana*, *nafulu*, *banua*, dan *öri* secara kolektif menjalankan beberapa fungsi yang dalam ekonomi modern ditangani oleh organisasi yang berbeda-beda: pengalokasian sumber daya, mobilisasi tenaga kerja, bantuan ekonomi, penegakan norma, dan standardisasi nilai. Pernyataan ini tidak berarti institusi-institusi tersebut identik dengan negara, bank, atau otoritas moneter modern, melainkan menunjukkan adanya kemiripan pada fungsi tertentu tanpa mengasumsikan kesamaan kelembagaan.

Utang sebagai Instrumen Kredit dan Modal Sosial Informal

Konsep utang (*ömö/gömö*) memperlihatkan dengan jelas bagaimana hubungan ekonomi tertanam dalam hubungan sosial masyarakat Nias Selatan. Beatty (1992, hlm. 183–184) menggambarkan *ömö* sebagai spektrum yang membentang dari utang komersial hingga utang moral, tanpa pemisahan mutlak antara keduanya. Utang yang secara material

dapat dihitung tetap mengandung dimensi moral, sementara kewajiban yang bersifat moral dapat dikuantifikasikan dan memperoleh konsekuensi ekonomi. Dengan demikian, jejaring utang sekaligus merupakan jejaring hubungan sosial dan kewajiban moral.

Dalam kerangka Mauss (1925), pola tersebut dapat dibaca melalui kewajiban memberi, menerima, dan membalas. Kewajiban pertukaran tidak terutama ditegakkan melalui kontrak tertulis dan pengadilan, melainkan melalui reputasi, norma, dan keyakinan religius. Rappard (1909, hlm. 578) dan Loeb (1935, hlm. 153), misalnya, mencatat konsekuensi sosial dan spiritual yang dilekatkan pada kegagalan seseorang membalas pemberian. Dari perspektif ekonomi kelembagaan, norma semacam ini dapat menjalankan sebagian fungsi penegakan komitmen tanpa memerlukan mekanisme hukum formal.

Namun keterlekatan utang pada hubungan sosial tidak selalu menghasilkan perlindungan atau solidaritas. Hull (1829, hlm. 491–492) mencatat mekanisme utang yang dapat berkembang menjadi subordinasi tenaga kerja: keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan nilai utang meningkat sampai mencapai nilai seorang budak, sementara utang juga dapat dilunasi melalui tenaga kerja. Temuan ini memperlihatkan sisi koersif institusi kredit informal ketika kewajiban ekonomi bertemu dengan ketimpangan status dan kekuasaan. Karena itu, modal sosial dalam kasus Nias Selatan tidak hanya memungkinkan individu memperoleh sumber daya melalui jaringan sosial, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat menghasilkan hubungan ketergantungan yang berat.

Pesta Status (*Ovasa*) sebagai Mekanisme Redistribusi dan Berbagi Risiko

Ovasa merupakan salah satu arena utama tempat hubungan antara produksi surplus, utang, kekerabatan, prestise, dan redistribusi menjadi terlihat secara konkret. Sumber daya untuk penyelenggaraan pesta tidak hanya berasal dari kekayaan penyelenggara, tetapi dapat dimobilisasi melalui pinjaman, hubungan kekerabatan dan afinal, serta kewajiban resiprokal yang telah terbentuk dari pertukaran sebelumnya. Dalam proses tersebut, *sulö* yang dibawa para tamu dapat merepresentasikan pembayaran kembali atas pemberian sebelumnya atau menciptakan kewajiban baru yang kelak harus dibalas (Beatty, 1991, hlm. 220–221).

Pada saat pesta, sebagian sumber daya tersebut didistribusikan kembali melalui *urakha*, yaitu bagian daging babi yang dibagikan menurut ukuran dan kedudukan penerima. Beatty (1991, hlm. 220–221) menunjukkan bahwa tuan rumah memperoleh *lakhömi* atau prestise justru melalui kapasitasnya membagikan sumber daya tersebut. Pola yang sama terlihat lebih luas dalam temuan bahwa status dan kesejahteraan tidak hanya dinilai dari kemampuan mengakumulasi kekayaan, tetapi juga dari kapasitas menghasilkan surplus untuk dibagikan

melalui pesta status (Yamamoto, 1986, hlm. 119; Beatty, 1991, hlm. 219; Viaro & Ziegler, 2017, hlm. 24). Karena itu, *ovasa* menciptakan tekanan kelembagaan untuk mengonversi sebagian surplus privat menjadi distribusi publik dan prestise sosial.

Jaringan kewajiban yang menopang *ovasa* sekaligus menciptakan mekanisme berbagi risiko dan mobilisasi sumber daya. Pemberian pada satu kesempatan dapat menciptakan klaim sosial yang dapat digunakan pada kesempatan berikutnya; jenis pinjaman tertentu bahkan dapat dilunasi hingga satu generasi kemudian ketika pemberi pinjaman kembali mengklaimnya untuk membiayai *ovasa* atau perkawinan anak laki-lakinya (Beatty, 1991, hlm. 220). Dalam pengertian terbatas, pola tersebut memiliki kemiripan fungsional dengan institusi keuangan informal seperti *rotating savings and credit associations* (ROSCA) (Bouman, 1979; Besley, Coate, & Loury, 1993). Namun keduanya bukan institusi yang identik: ROSCA umumnya memiliki kontribusi periodik dan giliran penerimaan yang relatif tetap, sedangkan pertukaran dalam *ovasa* bekerja melalui jaringan kewajiban resiprokal yang tidak seragam, berjangka panjang, dan tertanam dalam hubungan kekerabatan, perkawinan, status, dan adat.

Struktur pesta status juga berjenjang. Schröder (1917, hlm. 344) mencatat enam tahapan pertama yang dapat dilalui *sato* serta enam tahapan lanjutan bagi kalangan *si'ulu*, sementara Viaro dan Ziegler (2017, hlm. 26–28) menggambarkan enam tahap bagi rakyat biasa dan rangkaian dua belas tahap bagi bangsawan. Penyelesaian tahapan tersebut berkaitan dengan pengakuan status dan hak-hak tertentu; karena itu, secara analitis sistem ini dapat dibaca sebagai mekanisme yang mengondisikan pencapaian status pada kemampuan seseorang memobilisasi sumber daya ekonomi dan jaringan sosial, bukan sekadar pada garis keturunan.

Dalam penelitian ini, “**Bank Budi**” digunakan sebagai konsep analitis untuk merangkum konfigurasi yang lebih luas tersebut: jaringan utang, kewajiban resiprokal, kekerabatan, prestise, dan pesta status yang memungkinkan sumber daya dimobilisasi sekarang dengan menciptakan atau mengaktifkan klaim sosial yang dapat dibalas pada waktu lain. Dengan pengertian ini, *ovasa* merupakan arena penting tempat “**Bank Budi**” bekerja, tetapi **Bank Budi tidak identik dengan *ovasa*** dan istilah tersebut bukan nama yang digunakan oleh sumber etnografis.

Stratifikasi Sosial dan Implikasinya terhadap Alokasi Tenaga Kerja dan Kepemilikan Modal

Sistem ekonomi Nias Selatan pra-kolonial tidak dapat dipahami hanya melalui resiprositas dan redistribusi karena keduanya bekerja di dalam struktur sosial yang hierarkis. *Si'ulu* menempati posisi penting dalam penguasaan dan pengalokasian sumber daya. Loeb (1935, hlm. 142) mencatat bahwa pertanian dan peternakan babi merupakan dasar kemakmuran para pemimpin, yang kemudian dapat

meminjamkan uang atau barang kepada rakyat dengan bunga tinggi sehingga sebagian debitur menjadi bergantung kepada mereka. Rappard (1909, hlm. 597) juga mencatat penerimaan yang diperoleh kepala suku dari pemanfaatan tanah. Dengan demikian, jaringan kredit dan redistribusi tidak menghapus konsentrasi sumber daya dan kekuasaan pada kelompok tertentu.

Namun otoritas *si'ulu* juga tidak bersifat absolut. Dalam *orahua*, keputusan kepala suku diumumkan setelah berkonsultasi dengan anggota majelis lain, terutama bangsawan dan *si'ila*, sehingga pandangan aktor lain harus diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan (Scarduelli, 1990, hlm. 461). Mekanisme tersebut dapat dibaca sebagai pembatas informal terhadap otonomi politik seorang pemimpin, meskipun tidak identik dengan sistem *checks and balances* dalam negara modern.

Status *sawuyu* sebagai strata sosial formal diperdebatkan dalam literatur mengenai Nias Selatan. Laiya (1983, hlm. 31) tidak memasukkan *sawuyu* sebagai strata formal karena budak tidak mempunyai kedudukan dalam kosmologi dan organisasi desa, sedangkan Schröder, Loeb, dan Danandjaja tetap memperlakukannya sebagai bagian dari lapisan sosial masyarakat Nias. Bagi analisis ekonomi penelitian ini, persoalan yang lebih relevan adalah keberadaan praktik perbudakan dan tenaga kerja tidak bebas dalam struktur ekonomi pra-kolonial. Laiya (1983, hlm. 32) mencatat bahwa seseorang dapat menjadi budak antara lain karena utang, hukuman yang ditebus pihak lain, atau menjadi tawanan perang.

Keberadaan utang yang dapat berubah menjadi subordinasi tenaga kerja, kredit berbunga tinggi, dan perbedaan akses terhadap sumber daya memperlihatkan bahwa resiprositas serta redistribusi tidak otomatis menghasilkan kesetaraan. Sebaliknya, institusi yang memungkinkan solidaritas dan mobilisasi sumber daya juga dapat bekerja di dalam relasi kekuasaan yang timpang. Temuan ini penting agar analisis ekonomi tradisional Nias Selatan tidak jatuh pada romantisasi “kearifan lokal”, tetapi memperlihatkan secara bersamaan kapasitas institusi informal untuk menghasilkan kerja sama dan kemungkinan institusi yang sama mereproduksi ketergantungan serta hierarki.

Diskusi: Implikasi Teoretis dan Relevansi Kontemporer

Implikasi terhadap Teori Ekonomi Kelembagaan

Temuan penelitian memberikan beberapa implikasi terhadap kerangka teoretis yang digunakan.

Pertama, kasus Nias Selatan mendukung tesis Polanyi (1957) bahwa aktivitas ekonomi dapat terintegrasi melalui lebih dari satu mekanisme. *Ovasa* memperlihatkan secara konkret bagaimana pola yang secara analitis berbeda dapat beroperasi dalam satu institusi: sumber daya yang mengalir menuju penyelenggara banyak bergerak melalui kewajiban resiprokal, sedangkan sebagian sumber daya yang terkumpul kemudian bergerak keluar melalui

distribusi terpusat. Temuan tersebut tidak meniadakan perbedaan Polanyi antara resiprositas dan redistribusi, tetapi menunjukkan bahwa keduanya dapat diorkestrasi secara simultan dalam praktik kelembagaan konkret.

Kedua, kasus Nias Selatan memperlihatkan bahwa institusi informal dalam pengertian North (1990) tidak hanya membatasi perilaku, tetapi dapat membentuk perangkat yang relatif komprehensif untuk mengatur akses sumber daya, kerja kolektif, kewajiban, serta standardisasi pertukaran. Dalam konteks tanpa institusi negara modern yang menjangkau seluruh bidang kehidupan ekonomi, fungsi-fungsi tersebut tersebar di antara unit kekerabatan, komunitas, otoritas adat, dan jaringan sosial.

Ketiga, kasus Nias Selatan menyediakan ilustrasi konkret mengenai konversi modal sosial menjadi kapasitas ekonomi sebagaimana dibahas Bourdieu (1986). Jaringan hubungan yang dibangun melalui partisipasi jangka panjang dalam pertukaran memungkinkan seseorang memperoleh bantuan, tenaga, barang, atau kredit ketika membutuhkannya. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan sisi eksklusif modal sosial. Individu yang memiliki jaringan lebih lemah atau reputasi buruk mempunyai kapasitas mobilisasi sumber daya yang lebih terbatas. Hal tersebut sejalan dengan kritik mengenai sisi eksklusif dan konsekuensi negatif modal sosial (Portes, 1998).

Keempat, sistem *ömö/gömö* memperlihatkan relevansi tesis Mauss (1925) mengenai keterkaitan antara pertukaran material dan kewajiban sosial. Akan tetapi, kasus utang yang berujung pada subordinasi juga menunjukkan bahwa kewajiban memberi dan membalas tidak selalu menghasilkan hubungan egaliter. Ketika posisi ekonomi para pihak tidak seimbang, jaringan kewajiban dapat menjadi sarana reproduksi ketergantungan.

Relevansi bagi Studi Ekonomi Informal Kontemporer

Konfigurasi kelembagaan yang dalam penelitian ini disebut “Bank Budi” mempunyai sejumlah kemiripan fungsional dengan institusi informal kontemporer seperti arisan, gotong royong, dan kelompok simpan-pinjam berbasis hubungan sosial. Kemiripan tersebut tidak berarti bahwa institusi kontemporer merupakan kelanjutan langsung dan tidak berubah dari sistem pra-kolonial. Namun, temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme ekonomi berbasis kepercayaan, kewajiban timbal balik, dan jaringan sosial memiliki preseden historis yang panjang dalam masyarakat Nias Selatan.

Kajian terdahulu penulis (Laiya, Badaruddin, Fikarwin, & Lubis, 2024) menunjukkan bahwa perubahan struktur tradisional di Nias Selatan juga terkait dengan intervensi eksternal dan perubahan institusional selama periode kolonial. Dari perspektif ini, melemahnya institusi tertentu tidak harus ditafsirkan semata-mata sebagai proses evolusi

alamiah dari sistem “tradisional” menuju ekonomi “modern”, tetapi dapat pula dibaca sebagai hasil perubahan relasi kekuasaan dan kelembagaan.

Namun, penelitian historis ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa struktur resiprokal pra-kolonial masih beroperasi dengan bentuk dan intensitas yang sama dalam masyarakat Nias Selatan masa kini. Kontinuitas, transformasi, maupun hilangnya mekanisme tertentu merupakan pertanyaan empiris tersendiri yang memerlukan penelitian kontemporer.

Implikasi bagi Kebijakan Keuangan Inklusif dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Temuan historis penelitian ini menawarkan hipotesis yang relevan bagi kebijakan, bukan bukti langsung mengenai efektivitas suatu desain program kontemporer. Jika jaringan kekerabatan, kepercayaan, dan kewajiban resiprokal masih berfungsi dalam masyarakat Nias Selatan sekarang, jaringan tersebut berpotensi menjadi salah satu bentuk infrastruktur sosial bagi program pemberdayaan ekonomi dan keuangan inklusif. Tingkat keberlanjutan dan kekuatan jaringan tersebut, bagaimanapun, harus terlebih dahulu diuji melalui penelitian empiris.

Dengan batas tersebut, kebijakan ekonomi di wilayah yang memiliki basis kelembagaan adat dapat mempertimbangkan struktur sosial lokal ketika membentuk kelompok penerima kredit, tabungan kelompok, atau mekanisme pengawasan bersama. Pendekatan semacam itu tidak berarti menghidupkan kembali seluruh institusi tradisional, tetapi menggunakan pengetahuan mengenai cara kepercayaan, reputasi, dan kewajiban bekerja sebagai salah satu masukan dalam desain kelembagaan.

Pada saat yang sama, temuan mengenai jebakan utang, stratifikasi, dan tenaga kerja tidak bebas menunjukkan bahwa institusi informal tidak boleh diperlakukan secara romantis. Pemanfaatan elemen modal sosial dan kerja kolektif harus disertai perlindungan formal agar jaringan sosial tidak berubah menjadi mekanisme eksklusi, pemaksaan, atau ketergantungan baru.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini merekonstruksi struktur kelembagaan ekonomi tradisional masyarakat Nias Selatan pra-kolonial melalui pembacaan sumber historis-etnografis dan antropologis dengan kerangka ekonomi substantif Polanyi, Ekonomi Kelembagaan Baru North, teori modal sosial, dan ekonomi hadiah Mauss.

Pertama, beras, babi, dan emas merupakan objek nilai penting yang dalam penelitian ini dianalisis sebagai bentuk *commodity money*. Ketiganya menjalankan fungsi moneter dengan intensitas dan konteks berbeda serta didukung perangkat pengukuran yang membantu mengurangi ketidakpastian dalam transaksi.

Kedua, unit sosial seperti *gagambatō*, *gana*, *nafulu*, *banua*, dan *ōri* tidak hanya mengatur kekerabatan dan politik, tetapi juga menjalankan sejumlah fungsi ekonomi, antara lain pengelolaan sumber daya, mobilisasi tenaga kerja, penyediaan kebutuhan kolektif, penegakan kewajiban, dan standardisasi pertukaran.

Ketiga, *ōmō/gōmō* menunjukkan bahwa kredit dan kewajiban sosial tidak mudah dipisahkan. Reputasi, adat, dan hubungan berulang dapat menopang kepercayaan serta penegakan kewajiban tanpa kontrak formal, tetapi mekanisme yang sama juga dapat menghasilkan ketergantungan dan jebakan utang.

Keempat, *ovasa* menghubungkan mobilisasi sumber daya dengan redistribusi, prestise, dan kewajiban resiprokal. Institusi tersebut tidak identik dengan ROSCA atau lembaga simpan-pinjam modern, tetapi memperlihatkan bagaimana jaringan sosial dapat berfungsi sebagai sarana mobilisasi sumber daya dan berbagi risiko.

Kelima, hubungan antara jaringan kekerabatan, utang sosial, kewajiban resiprokal, mobilisasi sumber daya, dan redistribusi membentuk konfigurasi kelembagaan yang dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai “**Bank Budi**”. *Ovasa* merupakan salah satu arena penting tempat konfigurasi tersebut terlihat, tetapi “Bank Budi” tidak identik dengan *ovasa* semata. Istilah tersebut adalah konsep analitis penulis dan bukan nama emik institusi masyarakat Nias Selatan.

Keenam, sistem tersebut tidak menghasilkan kesetaraan secara otomatis. Stratifikasi sosial, ketimpangan akses terhadap sumber daya, utang yang dapat menghasilkan subordinasi, serta keberadaan *sawuyu* menunjukkan bahwa solidaritas dan eksploitasi dapat beroperasi di dalam arsitektur kelembagaan yang sama.

Secara keseluruhan, kasus Nias Selatan menunjukkan bahwa masyarakat yang integrasi ekonominya tidak terutama bergantung pada pasar dan institusi negara modern dapat membangun perangkat kelembagaan yang kompleks untuk mengelola produksi, pertukaran, kredit, kewajiban, dan redistribusi. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa beberapa pola integrasi yang dibedakan secara analitis dapat beroperasi secara bersamaan dalam satu institusi konkret.

Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian tidak membuktikan bahwa struktur kelembagaan pra-kolonial masih bertahan dalam bentuk yang sama pada masyarakat Nias Selatan kontemporer. Karena itu, implikasi kebijakan yang diajukan harus dipahami sebagai proposisi yang memerlukan pengujian empiris.

Apabila jaringan kekerabatan, kepercayaan, dan kewajiban resiprokal masih mempunyai peran ekonomi yang signifikan, program pemberdayaan dan keuangan inklusif dapat mempertimbangkannya sebagai bagian dari desain kelembagaan. Kelompok

sosial yang telah memiliki hubungan dan mekanisme kepercayaan dapat, setelah diverifikasi secara empiris, menjadi salah satu basis bagi tabungan kelompok, kredit mikro, atau bentuk pengelolaan sumber daya bersama.

Pemanfaatan modal sosial tersebut harus disertai perlindungan terhadap risiko eksklusi, ketergantungan, dan pemaksaan. Pengalaman historis Nias Selatan menunjukkan bahwa institusi informal dapat menghasilkan solidaritas sekaligus subordinasi. Karena itu, pendekatan berbasis kelembagaan lokal sebaiknya tidak berupa restorasi romantik institusi tradisional, melainkan adaptasi selektif terhadap elemen-elemen yang masih relevan dalam kerangka perlindungan hukum kontemporer.

Saran

Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji keberlanjutan dan transformasi institusi ekonomi informal dalam masyarakat Nias Selatan kontemporer. Studi lapangan dapat memetakan jaringan utang, bantuan antarkerabat, tabungan, kerja kolektif, dan mekanisme mobilisasi sumber daya serta membandingkannya dengan pola yang direkonstruksi dalam penelitian ini.

Penelitian komparatif juga dapat membandingkan konfigurasi yang dalam artikel ini dikonseptualisasikan sebagai “Bank Budi” dengan ROSCA, arisan, kelompok simpan-pinjam berbasis komunitas, atau institusi resiprokal lain tanpa terlebih dahulu mengasumsikan kesamaan institusional di antara mereka. Penelitian tersebut sekaligus dapat menilai kemungkinan penggunaan modal sosial lokal dalam desain keuangan inklusif serta risiko eksklusi dan eksploitasi yang mungkin menyertainya.

5. REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Sumatra Utara. (2025). *Sumatra Utara dalam angka 2025*. Badan Pusat Statistik Sumatra Utara.
- Beatty, A. (1991). Ovasa: Feasts of merit in Nias. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 147(2/3), 216–235.
- Beatty, A. (1992). *Society and exchange in Nias*. Clarendon Oxford.
- Besley, T., Coate, S., & Loury, G. (1993). The economics of rotating savings and credit associations. *American Economic Review*, 83(4), 792–810.
- Bouman, F. J. A. (1979). The ROSCA: Financial technology of an informal savings and credit institution in developing economies. *Savings and Development*, 3(4), 253–276.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Danandjaja, J. (1976). Ono Niha: Penduduk Pulau Nias. *Peninjau*, III(1–2), 90–123.
- Gowasa, I., & Ritonga, S. (2015). Implementasi Program Raskin untuk membantu perekonomian masyarakat miskin di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 97–111. <https://doi.org/10.31289/publika.v3i2.1015>
- Gulo, T., Ginting, B., & Suriadi, A. (2005). Kebijakan dalam upaya memerangi kemiskinan di Nias. *Jurnal Studi Pembangunan*, 1(1), 29–42.
- Hull, S. (1829). *Memoir of the life and public services of Sir Thomas Stamford Raffles: Particularly in the government of Java, 1811–1816, Bencoolen and its dependencies, 1817–1824: With details of the commerce and resources of the Eastern Archipelago, and selections from his correspondence*. John Murray.
- Laiya, B. (1983). *Solidaritas kekeluargaan dalam salah satu masyarakat desa di Nias, Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Laiya, J. S., Badaruddin, B., Fikarwin, F., & Lubis, Z. (2024). Oral tradition and the discourse of poverty in pre-colonial South Nias: An interpretative study with a Foucaultian approach. *Research Journal in Advanced Humanities*, 5(2). <https://doi.org/10.58256/trzbw809>
- Lansing, J., & deVet, T. (1999). Head-hunting, chieftainship and alliance in Southern Nias. In L. Arragon & S. Russell (Eds.), *Structuralism's transformations: Order and revisions in Indonesian and Malay society* (pp. 69–91). Arizona State University Program for Southeast Asian Studies Monograph Series Press.
- Loeb, E. (1935). *Sumatra: Its history and people*. Institut für Völkerkunde der Universität Wien.
- Mauss, M. (1925). *Essai sur le don [The gift: Forms and functions of exchange in archaic societies]* (I. Cunnison, Trans., 1954). Cohen & West.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Polanyi, K. (1957). The economy as instituted process. In K. Polanyi, C. M. Arensberg, & H. W. Pearson (Eds.), *Trade and market in the early empires: Economies in history and theory* (pp. 243–270). Free Press.
- Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. *Annual Review of Sociology*, 24, 1–24.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rappard, Th. C. (1909). Het Eiland Nias en zijne bewoners. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, 62(3–4), 477–648.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119.
- Rivai, R. (1989). Keragaan tingkat kesejahteraan masyarakat (Studi kasus di Pulau Nias). *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 7(2), 51–59. <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v7n2.1989.51-59>
- Scarduelli, P. (1990). Accumulation of heads, distribution of foods: The image of power in Nias. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 146(4), 448–462.
- Schröder, E. E. W. G. (1917). *Ethnographische, geographische en historische aantekeningen en studiën*. E. J. Brill.
- Telaumbanua, T., & Hümmel, U. (2015). *Salib dan adu*. Gunung Mulia.
- Viaro, A., & Ziegler, A. (2017). *Traditional architecture of Nias Island*. Yayasan Pusaka Nias.
- Waruwu, F. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Nias, 1994–2004* [Tesis magister tidak diterbitkan]. Universitas Gadjah Mada.
- Yamamoto, Y. (1986). *A sense of tradition: An ethnographic approach to Nias material culture* [Unpublished doctoral dissertation]. Cornell University.